

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Perdagangan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara karena perdagangan menjadi akar dari perekonomian suatu negara. Menurut Marwati Djoened, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Perkembangan global yang sangat pesat membuat proses perdagangan yang dulu hanya menggunakan metode barter berkembang menjadi metode digital. Selain perdagangan, yang tak kalah pentingnya di era globalisasi saat ini adalah kemajuan teknologi, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat dengan membawa berbagai kemudahan yang ditawarkan, yang berdampak positif bagi perekonomian dunia dengan produk yang dipasarkan sebagai objek pasar sehingga, mereka dapat menjangkau seluruh penjuru dunia dan membuat perdagangan semakin mendominasi di pasar global. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

UMKM memiliki makna yang berbeda pada setiap badan atau forum serta undang – undang yang berbeda. Undang – Undang yang digunakan adalah UU No. 20 Thn 2008 yang sekarang telah dirubah menjadi PP No.7 Thn 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah dimana UMKM diidentifikasi dalam 3 kelompok usaha yakni usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dimana diatur dalam PP, Usaha Kecil yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri

oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai PP. Sedangkan Usaha Menengah yaitu usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang usaha besar sesuai kriteria PP. UMKM memiliki modal usaha paling minimal Rp1.000.000.000,- sampai dengan maksimal Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Memiliki omset tahunan paling minimal Rp 2.000.000.000,- dan maksimal Rp 50.000.000.000,- .

Sesuai dengan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 % atau Rp 8.573,89 Triliun, UMKM bisa menyedot 97% dari total pekerja yang dipekerjakan dan dapat mengumpulkan 60,42 % dari total investasi di Indonesia. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan juga merupakan penyedia lapangan kerja terbesar serta berperan penting dalam pembangunan ekonomi, menciptakan pasar baru dan penemuan, serta berkontribusi pada neraca pembayaran.

Segala bentuk usaha baik negeri ataupun swasta bahkan milik orang perorangan pasti membutuhkan pelaporan keuangan termasuk juga UMKM, akan tetapi setiap usaha memiliki standar penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan status dan kepemilikan usaha. Pemerintah telah menetapkan standar dalam penyusunan laporan keuangan UMKM di dalam standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan akuntansi (Harahap, 2008). Akuntansi adalah sebuah alat ukur untuk mengukur tanggung jawab manajemen serta sistem informasi. Maksud yang diukur ialah kegiatan ekonomi bersifat maju, bukan sesuatu yang masih kuno, misalnya barter. Akuntansi juga merupakan suatu siklus yang mana aktivitasnya harus berlangsung secara terstruktur (Juniardi, 2016).

Akuntansi meliputi kerangka konseptual, metode, standar, prosedur dan serta teknik dalam pelaporan keuangan yang umumnya disebut Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari informasi tentang posisi keuangan perusahaan dan gambaran atas pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi UMKM karena laporan keuangan pada umumnya digunakan untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai acuan bagi pemilik usaha untuk menghitung keuntungan yang diperoleh pada periode tertentu, besarnya penambahan modal, menentukan target keuntungan di periode yang akan datang dan juga mengetahui keseimbangan antara aset dan kewajiban untuk mengembangkan usaha yang dimiliki (Yola Tarida, 2019).

Berdasarkan SAK EMKM (IAI, 2016:1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang substansial, di mana definisi dan kriteria UMKM sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam 2 tahun berturut. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar akuntansi akrual dan kelangsungan usaha, sama dengan entitas bisnis dan menggunakan konsep entitas bisnis.

Pada UMKM, pencatatan pemilik usaha hanya menggunakan pencatatan sederhana, dan tidak menggunakan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemilik usaha melakukan pencatatan hanya dengan menghitung selisih uang masuk dan uang keluar, jumlah barang yang dibeli dan dijual, serta jumlah piutang dan hutang serta harga pokok barang, hal ini tidak menggunakan standar akuntansi keuangan yang sudah ditentukan pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan tidak menggambarkan informasi keuangan dari UMKM tersebut. Informasi akuntansi tersebut akan menjadi output yang berguna untuk pengambilan keputusan, antara lain pertimbangan untuk membeli peralatan dan bahan baku produksi, penetapan harga, pengajuan pembiayaan bank,

penambahan aset serta pengembangan usaha dan sumber daya manusia (Juniardi, 2016).

UMKM yang menjadi subjek penelitian ini adalah CV. Dunia Khatulistiwa terletak di Jl. Ampera No. 42 – 43 Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. CV. Dunia Khatulistiwa bergerak di bidang distributor beras merk Luwak Madu yang pemasarannya dilakukan di wilayah Sintang. Diklasifikasikan sebagai UMKM karena tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta tidak terdaftar di pasar modal, bukan lembaga keuangan, dan modal berasal dari pemilik usaha. CV. Dunia Khatulistiwa belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku yaitu SAK EMKM. Pencatatan yang dilakukan oleh pengelola berupa kegiatan barang masuk dan keluar, pemasukan dan pengeluaran usaha, hutang piutang, dan harga pokok penjualan tanpa ada pencatatan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 1.1 Laporan Pendapatan Dan Pengeluaran CV. Dunia Khatulistiwa 2021**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>
1	JANUARI	Rp 99.811.500	Rp 33.000.000
2	FEBRUARI	Rp 45.887.250	Rp31.000.000
3	MARET	Rp 74.865.750	Rp36.175.000
4	APRIL	Rp 71.741.000	Rp31.000.000
5	MEI	Rp 92.759.000	Rp37.200.000
6	JUNI	Rp 75.610.000	Rp27.760.000
7	JULI	Rp 76.247.750	Rp26.980.000
8	AGUSTUS	Rp 66.580.000	Rp27.000.000
9	SEPTEMBER	Rp 74.441.500	Rp25.500.000
10	OKTOBER	Rp 46.903.000	Rp27.200.000
11	NOVEMBER	Rp 39.222.000	Rp26.300.000
12	DESEMBER	Rp 65.139.250	Rp26.350.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 829.208.000</b>	<b>Rp 355.465.000</b>

Sumber : Data olahan CV. Dunia Khatulistiwa

UMKM belum menerapkan laporan keuangan sesuai SAK EMKM dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan

laporan keuangan, tidak adanya sosialisasi tentang SAK EMKM serta juga pemilik tidak memiliki hubungan dengan pihak luar seperti Bank (Hennita Oktavira, 2018). Kendala lainnya adalah kurangnya tenaga akuntansi yang profesional dan pemilik tidak diharuskan untuk mengukur keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa selain kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang standar penyusunan laporan sesuai standar yang berlaku dan kurangnya tenaga akuntansi yang profesional, kurangnya kesadaran pihak pelaku usaha dalam mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM juga menjadi kendala pada penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM (Riyanti, 2019).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membantu pemilik usaha menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM karena mengingat pentingnya laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan, pengembangan usaha, serta sebagai bahan penilaian aktivitas keuangan usaha CV. Dunia Khatulistiwa. Hal ini sejalan dengan rencana kegiatan keuangan perusahaan yaitu adanya informasi keuangan yang jelas dan terstruktur untuk laporan akhir periode baik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan juga akun – akun tertentu yang relevan.

Dengan diterapkannya SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM CV. Dunia Khatulistiwa diharapkan dapat memudahkan serta memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan sehingga usaha tersebut dapat berjalan lebih dengan baik untuk perkembangan dan kemajuan usaha itu sendiri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.2.2 Bagaimana implementasi SAK EMKM pada laporan keuangan CV. Dunia Khatulistiwa?**

### **1.3 Batasan Masalah**

Penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas pada tulisan ini ialah “IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH (SAK EMKM) PADA CV. DUNIA KHATULISTIWA “

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1.4.1 Mengetahui Implementasi SAK EMKM pada laporan keuangan CV. Dunia Khatilistiwa

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1.5.1 Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dalam sistematis penyusunan laporan keuangan pada UMKM dan menambah pengalaman yang dapat menunjang di masa yang akan datang.

1.5.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharap dapat menjadi referensi untuk rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian atau yang ingin meneliti namun dengan cakupan masalah yang lebih luas.

1.5.3 Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharap dapat membantu pelaku UMKM untuk melihat perkembangan usahanya di periode yang akan datang dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan usahanya.